

**TESIS**

**DAMPAK KEDUDUKAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK  
KEDAMANGAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH TERHADAP HAK-HAK  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK**



**YOPIE SUSANTO**

No. Mhs.: 135202046/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2015**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

PERSETUJUAN TESIS

Nama : YOPIE SUSANTO  
Nomor Mahasiswa : 135202046/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : DAMPAK PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI  
KALIMANTAN TENGAH TERHADAP KEDUDUKAN  
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK KEDAMANGAN

Nama Pembimbing  
Prof.Dr.Dra.MG. Endang Sumiarni,  
SH., M. Hum.

Tanggal  
28 - April 2015

Tanda tangan




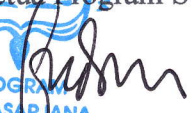
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : YOPIE SUSANTO  
Nomor Mahasiswa : 135202046/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : DAMPAK PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI  
KALIMANTAN TENGAH TERHADAP KEDUDUKAN  
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK KEDAMANGAN

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Prof.Dr.Dra.MG. Endang Sumiarni, SH., M. Hum. (Ketua)	15-5-2015	
Dr. C. Kastowo, S.H., MH. (Anggota)	18-5-2015	
Anny Retnowati, S.H., M. Hum (Anggota)	17-5-2015	

  
Ketua Program Studi  
  
PROGRAM PASCASARJANA  
Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

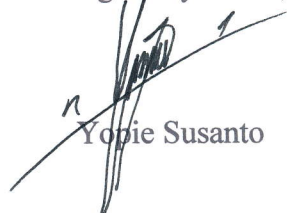
Nama : Yopie Susanto

NPM : 135202046/PS/MIH

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis yang berjudul “Dampak Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak” adalah hasil karya pribadi dan bukan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada sebelumnya serta belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian penulis sendiri dan atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing yang belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2015  
Yang Menyatakan,

  
Yopie Susanto

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kadamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak dan latar belakang kelembagaan adat Dayak Kadamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan politik hukum, serta mengkajinya dari perspektif teori legislasi. Dengan menggunakan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kadamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum adat Dayak, yaitu: (1) hukum adat materiil mengenai lembaga adat Dayak Kadamangan menjadi materi hukum positif sehingga menghilangkan hukum adat; (2) tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat khususnya mengenai lembaga adat Dayak Kadamangan dan hak-hak tradisionalnya; (3) hilangnya sifat hukum adat yang dinamis. Dan latar belakang kelembagaan adat Dayak Kadamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah dikarenakan terbentuknya organisasi masyarakat adat Dayak berupa Majelis Adat Dayak Nasional dengan membentuk Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Kelurahan. Keberadaan organisasi adat dimasukan ke dalam ranah politik, sehingga terbentuknya lembaga adat Dayak ini dimanfaatkan sebagai alat politik pemilihan kepala daerah terpilih.

**Kata-kata kunci: Kedudukan, Kadamangan, Peraturan Daerah.**

## ABSTRACT

This study aims to identify and assess the impact of the institutional position of the indigenous Dayak Kedamangan in Central Kalimantan Provincial Regulation No. 16 Year 2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan on the rights of indigenous Dayak community and institutional background Dayak Kedamangan formulated in Provincial Regulation Central Kalimantan No. 16 of 2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan.

This study is a normative legal political approach, and study it from the perspective of the theory of legislation. By using the principle of *lex superior derogate legi inferiori*, the legislation of a higher override legislation is lower.

The impact of the institutional position of the indigenous Dayak Kedamangan in Provincial Regulation No. 16 of 2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan on the Rights of Indigenous Peoples Law Dayak, namely: (1) the material of customary law concerning indigenous Dayak institutions Kedamangan become a matter of positive law thus eliminating the law customs; (2) the lack of recognition and respect for the rights of indigenous people, especially the indigenous Dayak Kedamangan institutions and traditional rights; (3) the loss of the dynamic nature of customary law. And institutional background Dayak Kedamangan formulated in Provincial Regulation No. 16 of 2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan due to the formation of organizations of indigenous Dayak Dayak in the form of the National Assembly to form a Provincial Dayak Customary Council, Dayak Customary Council District / Town, Traditional Council Dayak Dayak Customary Council District and the Village. The existence of indigenous organizations entered into the political arena, so the formation of customary institutions Dayak is used as a political tool elected local elections.

**Key words: Position, Kedamangan, Regional Regulation.**

## KATA PENGANTAR

Segala puja, puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Maha Kekal atas segala rahmat, berkat dan kasih setiaNya yang tak berkesudahan sehingga tesis yang berjudul “Dampak Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Tergadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini sebagai rangkaian proses penelitian dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini telah melalui proses yang cukup panjang dan seringkali penuh dengan hambatan dan tantangan. Kesungguhan, niat yang teguh, harapan dan doa senantiasa menjadi kekuatan dalam menghadapi semua itu sehingga selalu ada jalan yang terbuka untuk berproses secara lebih baik. Motivasi, semangat dan kasih dari para dosen, keluarga, teman-teman dan semua pihak lainnya akan selalu dikenang. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak adalah:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, menginspirasi, dan memotivasi penulis

dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan perhatian selama proses pengerjaan tesis. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan.

3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah banyak masukan dan pengetahuan demi perbaikan tesis ini. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan.
4. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan pengetahuan demi perbaikan tesis ini. Semoga ibu dan keluarga juga senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan.
5. Bapak/Ibu dosen Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang luar biasa dengan pendekatan relasi yang akrab, ramah dan penuh pengertian khususnya bagi kami mahasiswa yang berlatarbelakang non hukum untuk belajar dan kritis terhadap hukum.
6. Para Petugas perpustakaan Atma Jaya yang berada di Babarsari dan di Mrican dan Para admisi Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Para Narasumber yaitu Bapak Amir Hamzah K. Hadi., SH. (mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah), Bapak Sabran Achmad (Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi) dan Bapak Lewis KDR, BBA. (tokoh masyarakat adat DayakProvinsi Kalimantan Tengah).
8. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan September 2013 Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah



mendukung, menyemangati dan memberikan kontribusi yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya penelitian ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis terbuka untuk menerima kritik, koreksi dan masukan dari berbagai pihak demi perbaikan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat seluruh bagi pembaca dan dunia akademis.

Penulis

**MOTTO**

*serviens in lumine veritatis*

***Yesaya 55:6***

*Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui;*

*Berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas karunia, berkat dan hikmat yang dilimpahkan  
Tuhan Yesus Kristus.

Dengan kasih karunia-Nya aku bisa menyelesaikan Tugas akhir  
berupa Karya ilmiah dalam bentuk Tesis

Kepada Keluargaku Tercinta

Ayahanda yang luar biasa telah membimbingku dari tidak tau apa-apa menjadi  
seperti sekarang (Bambang Jamal) dan Almarhum Ibunda yang telah tiada  
(Immi W. Demas), Kaka Kandung (Yobie Sandra S.Stp., M.A.) beserta Istri  
(Deasy Oktariani, SE), Adik Kandung Terkasih (Yosep Triantoni, A.md.)

Dan Keluarga besar yang tidak bisa saya tulis satu persatu  
Terimakasih untuk dukungan dan doanya

Kepada Teman-temanku

Terimakasih atas dukungan semangatnya

Kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tempatku belajar dan menimba ilmu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	iii
<b>ABSTRAKSI</b>	iv
<b>ABSTRACT</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>MOTTO</b>	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	x
<b>DAFTAR ISI</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b>	1
<b>B. Rumusan Masalah</b>	7
<b>C. Batasan Masalah</b>	7
<b>D. Keaslian Penelitian</b>	8
1. Tesis Pembandingan I	8
2. Tesis Pembandingan II	10
3. Tesis Pembandingan III	13
<b>E. Manfaat Penelitian</b>	15
1. Manfaat Teoretis	15
2. Manfaat Praktis	16
a. Manfaat bagi Pemerintah	16
b. Manfaat bagi Masyarakat	16

<b>F. Tujuan Penelitian</b>	16
<b>G. Sistematika Penulisan</b>	17
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	 19
<b>A. Dampak kedudukan lembaga adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah</b>	19
<b>B. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak</b>	40
<b>C. Landasan Teori</b>	59
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	 62
<b>A. Jenis Penelitian</b>	62
<b>B. Pendekatan Penelitian</b>	62
<b>C. Sumber Data</b>	63
a. Bahan Hukum Primer	63
b. Bahan Hukum Sekunder	65
<b>D. Metode Pengumpulan Data</b>	66
a. Studi Kepustakaan	66
b. Wawancara	66
<b>E. Analisis Hukum</b>	66
1. Analisis Data Bahan Hukum Primer	67
a. Deskripsi	67
b. Sistematikasi	67
c. Interpretasi Hukum	70
1) Interpretasi Gramatikal	70
2) Interpretasi Sistemis	70
3) Interpretasi Teologis	70
d. Menilai Hukum Positif	70
2. Analisis Bahan Hukum Sekunder	70
<b>F. Proses Berpikir</b>	71

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	73
<b>A. Geografis Provinsi Kalimantan Tengah</b>	73
<b>B. Lembaga Adat Dayak Di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	76
<b>C. Dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamaian dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak</b>	81
1. Hukum adat materiil mengenai lembaga adat Dayak Kedamaian berubah menjadi materi hukum positif sehingga menghilangkan hukum adat	87
2. Tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat khususnya mengenai lembaga adat Dayak Kedamaian dan hak-hak tradisionalnya	91
3. Hilangnya sifat hukum adat yang dinamis	93
<b>D. Latar Belakang Kelembagaan Adat Dayak Dirumuskan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak</b>	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	103
<b>A. Kesimpulan</b>	103
<b>B. Saran</b>	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	105

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penyebaran dan luas masing-masing kelas ketinggian wilayah daratan Provinsi Kalimantan Tengah.....	75
Tabel 1.2 Luas masing-masing kelas kemiringan wilayah daratan Provinsi Kalimantan Tengah.....	76
Tabel 2.1 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah .....	78
Tabel 2.2 Data lembaga adat Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	78